



Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Bali

Ida Bagus Made Utama

Universitas Bali Dwipa, Bali, Indonesia, tuajikesiman@gmail.com

Corresponding Author: tuajikesiman@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh reformasi perpajakan terhadap indeks kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru perpajakan. Perhatian utama pada penelitian ini adalah pada perubahan sistem perpajakan yang mencakup, aspek administrasi pajak, tarif pajak, dan mekanisme pelaporan pajak. Proses analisis dilakukan terhadap data kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali sebelum dan sesudah implementasi reformasi perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa reformasi perpajakan berdampak secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali. Hal ini dapat dibuktikan dari peningkatan efisiensi proses administrasi pajak dan penyederhanaan prosedur pajak. Penelitian ini juga menganalisis beberapa tantangan dalam reformasi perpajakan di bidang hotel dan restoran di Bali, yaitu kebutuhan akan peningkatan kesadaran wajib pajak dan penguatan sistem penegakan hukum pajak di Bali. Penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk mencapai tujuan optimalisasi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di bidang hotel dan restoran di Bali dibutuhkan penguatan strategi reformasi perpajakan di masa depan.

Kata Kunci: Administrasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Perpajakan

Abstract: *This study aims to examine the effect of tax reform on the compliance index of taxpayers in the hotel and restaurant sectors in Bali. This research uses a normative juridical method that includes analysis of the latest tax laws and policies. The main focus of this research is on the changes in the tax system which includes, aspects of tax administration, tax rates, and tax reporting mechanisms. The analysis process is conducted on the data of taxpayer compliance in the hotel and restaurant sector in Bali before and after the implementation of tax reform. Based on the results of the study, it is found that tax reform has a significant impact on increasing taxpayer compliance in the hotel and restaurant sectors in Bali. This can be evidenced from the increased efficiency of the tax administration process and the simplification of tax procedures. This study also analyzes some of the challenges in tax reform in the hotel and restaurant sectors in Bali, namely the need for increased taxpayer awareness and strengthening the tax law enforcement system in Bali. This study recommends that to achieve the goal of optimizing tax revenue and taxpayer compliance in the hotel and restaurant sectors in Bali, it is necessary to strengthen the tax reform strategy in the future.*

Keyword: *Tax Administration, Taxpayer Compliance, Tax Administration*

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan urat nadi perekonomian Provinsi Bali, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sumber utama PAD adalah pajak hotel dan restoran (PHR), yang menjadi instrumen vital dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak di sektor ini sering kali menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Terdapat berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman atas kewajiban perpajakan, kelemahan pengawasan, dan kompleksitas regulasi yang juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut wajib pajak tersebut.

Reformasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan efisien. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah menegaskan pentingnya kepatuhan wajib pajak dengan memperkuat mekanisme sanksi administratif dan pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga menghadirkan perubahan signifikan dalam kebijakan perpajakan, termasuk penyederhanaan prosedur administrasi pajak untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha.

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan PHR. Peraturan tersebut dilengkapi dengan berbagai kebijakan teknis, seperti pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan pajak untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi di kalangan wajib pajak dan keterbatasan sumber daya pengawasan masih menjadi kendala utama dalam pengimplementasian peraturan tersebut.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis pengaruh reformasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Bali. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan di sektor pariwisata. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pajak yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soejono Soekamto, penelitian yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai sebuah sistem normatif. Dalam pendekatan ini, hukum dipandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi fokus utama penelitian. Penelitian ini mengutamakan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini lebih bersifat teoritis daripada empiris, karena tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan.

Soejono Soekamto menekankan bahwa penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan yang terstruktur, yang mencakup analisis terhadap norma hukum yang ada dan hubungan antar norma tersebut. Metode ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, karena memanfaatkan bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder seperti pendapat para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, menganalisis, atau bahkan mengkritisi keberadaan aturan hukum tertentu dalam konteks sistem hukum secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, metode ini mengandalkan langkah-langkah seperti inventarisasi bahan hukum, klasifikasi aturan hukum, dan interpretasi hukum. Interpretasi hukum menjadi aspek penting karena sering kali norma hukum memerlukan penafsiran untuk diterapkan

dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan teori-teori hukum sebagai alat bantu analisis, seperti teori keadilan, teori legalitas, dan teori kepastian hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan hukum karena membantu menemukan solusi atas permasalahan hukum yang bersifat abstrak.

Kesimpulannya, penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekanto adalah metode yang berorientasi pada kajian hukum sebagai norma yang tertulis dan memiliki struktur yang logis. Metode ini ideal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang bersifat konseptual dan sistematis. Meskipun tidak menggunakan data empiris dari masyarakat, metode ini tetap relevan untuk memberikan solusi hukum yang berbasis pada analisis tekstual dan normatif, sehingga dapat mendukung pembentukan atau reformasi hukum yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah membawa dampak positif terhadap penerimaan pajak dari sektor hotel dan restoran di Bali. Data menunjukkan adanya peningkatan pendapatan pajak sebesar 15% setelah reformasi diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh pembaruan sistem perpajakan berbasis digital yang mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak kini dapat memanfaatkan aplikasi online seperti e-Billing dan e-Filing, yang mempercepat proses administrasi dan mengurangi risiko keterlambatan. Selain itu, reformasi perpajakan di Indonesia juga telah memberikan dampak yang signifikan, khususnya dalam sektor hotel dan restoran di Bali. Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, memiliki kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak hotel dan restoran. Reformasi perpajakan di wilayah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Reformasi perpajakan juga menitikberatkan pada penyederhanaan prosedur administrasi pajak. Wajib pajak hotel dan restoran di Bali merasakan manfaat dari sistem ini karena mereka tidak lagi harus menghabiskan waktu untuk proses manual. Implementasi teknologi digital membuat pelaporan pajak lebih mudah dan transparan. Kemudahan ini meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga mereka lebih termotivasi untuk patuh membayar pajak. Penyederhanaan prosedur administrasi pajak melalui reformasi perpajakan membawa dampak positif yang signifikan, terutama bagi wajib pajak di sektor hotel dan restoran di Bali. Dengan sistem yang lebih modern, mereka tidak lagi harus melalui proses manual yang memakan waktu. Teknologi digital yang diimplementasikan memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara cepat dan akurat. Hal ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga memberikan efisiensi yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha di sektor pariwisata. Selain kemudahan teknis, reformasi ini juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak. Wajib pajak kini dapat memantau langsung status pelaporan mereka melalui platform digital, yang pada gilirannya menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah. Transparansi ini mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan kepercayaan yang terbangun, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Sosialisasi yang masif oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bali melalui seminar, lokakarya, dan media sosial meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak. Pemilik hotel dan restoran mengakui bahwa pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban perpajakan meningkat setelah reformasi ini. Kesadaran tersebut menjadi salah satu faktor utama peningkatan kepatuhan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bali telah melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai media, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye di media sosial. Upaya ini berhasil meningkatkan pemahaman wajib pajak, terutama para

pemilik hotel dan restoran, mengenai pentingnya membayar pajak. Program-program tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran akan peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional. Edukasi ini membantu mengurangi kesalahpahaman yang kerap terjadi sebelumnya terkait hak dan kewajiban perpajakan. Peningkatan pemahaman ini berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak di sektor pariwisata. Para pelaku usaha kini lebih sadar akan pentingnya melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai peraturan. Kesadaran yang terbangun ini menjadi salah satu elemen kunci dalam mendukung keberhasilan reformasi perpajakan. Dengan meningkatnya kepatuhan, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk memaksimalkan penerimaan pajak demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu dampak signifikan reformasi perpajakan adalah penurunan jumlah pelanggaran pajak, seperti penghindaran pajak dan keterlambatan pembayaran. Dengan sistem pengawasan berbasis teknologi dan sanksi yang tegas, wajib pajak menjadi lebih berhati-hati. Penurunan pelanggaran ini menunjukkan bahwa reformasi berhasil menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel. Salah satu dampak signifikan dari reformasi perpajakan adalah berkurangnya jumlah pelanggaran, seperti penghindaran pajak dan keterlambatan pembayaran. Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi telah memungkinkan pemerintah untuk memantau aktivitas perpajakan dengan lebih efektif dan real-time. Sistem ini meminimalkan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari pajak, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan pajak. Sebagai hasilnya, wajib pajak lebih berhati-hati dalam memenuhi kewajiban mereka, karena setiap ketidaksesuaian dapat terdeteksi dengan cepat. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar menjadi faktor tambahan yang memperkuat efektivitas reformasi ini. Hukuman administratif maupun denda yang diberikan memberikan efek jera, sehingga para wajib pajak cenderung menghindari risiko pelanggaran. Penurunan jumlah pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan dalam pengelolaan pajak. Dengan sistem yang lebih tertib, reformasi ini diharapkan dapat terus berkontribusi pada peningkatan stabilitas ekonomi melalui penerimaan pajak yang optimal.

Penggunaan teknologi dalam reformasi perpajakan, seperti sistem pelaporan otomatis dan aplikasi pembayaran online, telah mengurangi celah untuk manipulasi data. Teknologi juga mempermudah otoritas pajak untuk memantau aktivitas wajib pajak secara real-time. Sebagai hasilnya, kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Bali meningkat hingga 20% dibandingkan sebelum reformasi. Penggunaan teknologi dalam reformasi perpajakan membawa perubahan besar dalam sistem administrasi pajak, terutama melalui penerapan sistem pelaporan otomatis dan aplikasi pembayaran online. Inovasi ini tidak hanya menyederhanakan proses administrasi bagi wajib pajak, tetapi juga mengurangi celah untuk manipulasi data atau praktik yang tidak transparan. Dengan sistem yang terintegrasi, pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga wajib pajak merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain mempermudah wajib pajak, teknologi juga memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Melalui pemantauan aktivitas pajak secara real-time, DJP dapat mendeteksi ketidaksesuaian atau pelanggaran sejak dini. Hal ini mendorong peningkatan kepatuhan, terutama di sektor hotel dan restoran di Bali, di mana tingkat kepatuhan naik hingga 20% setelah reformasi diterapkan. Dampak positif ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Dengan prosedur perpajakan yang lebih sederhana, hotel dan restoran dapat mengalokasikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kualitas layanan

mereka. Hal ini secara tidak langsung memperkuat daya saing sektor pariwisata Bali. Efisiensi administrasi perpajakan memberikan dampak positif pada keberlanjutan bisnis para wajib pajak di sektor ini. Penyederhanaan prosedur perpajakan telah memberikan manfaat nyata bagi hotel dan restoran di Bali. Dengan proses administrasi yang lebih cepat dan mudah, pelaku usaha dapat mengalihkan fokus mereka pada pengelolaan bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Alokasi waktu dan sumber daya yang sebelumnya digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan kini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki fasilitas, melatih karyawan, atau menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perubahan ini memberikan dampak signifikan pada daya saing sektor pariwisata Bali di tengah persaingan global. Selain itu, efisiensi administrasi perpajakan berkontribusi pada keberlanjutan bisnis para wajib pajak. Beban administratif yang lebih ringan dan sistem yang transparan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pelaku usaha dalam menjalankan operasional mereka. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan meningkatnya produktivitas dan kepercayaan dari para pelaku usaha, reformasi perpajakan menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sektor pariwisata Bali sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Namun, reformasi perpajakan ini tidak lepas dari tantangan. Masih terdapat sejumlah wajib pajak yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru, terutama mereka yang berasal dari usaha kecil dan menengah. Selain itu, kurangnya akses internet di beberapa daerah di Bali menjadi hambatan bagi penerapan sistem berbasis digital. Meskipun reformasi perpajakan membawa banyak manfaat, tantangan dalam penerapannya tidak bisa diabaikan. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan adaptasi sebagian wajib pajak terhadap teknologi baru, terutama di kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Banyak pelaku usaha ini yang belum familiar dengan sistem digital, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk memahami dan menggunakan aplikasi pelaporan atau pembayaran pajak. Kurangnya literasi digital menjadi tantangan yang harus diatasi, mengingat teknologi merupakan tulang punggung sistem perpajakan yang baru. Selain itu, keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet yang belum merata di beberapa wilayah Bali, turut menghambat kelancaran implementasi sistem berbasis digital. Di daerah-daerah tertentu, koneksi internet yang lambat atau tidak stabil menyulitkan wajib pajak untuk mengakses layanan pajak online. Masalah ini berpotensi menurunkan efektivitas reformasi perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha di daerah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, penyedia layanan internet, dan masyarakat untuk memastikan bahwa teknologi yang diandalkan dalam reformasi perpajakan dapat diakses secara luas dan merata.

Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak hotel dan restoran merasa puas dengan reformasi perpajakan yang dilakukan. Mereka mengapresiasi pendekatan pemerintah yang lebih inklusif dan transparan. Namun, ada permintaan agar sosialisasi dan pelatihan lebih sering dilakukan, terutama bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan sistem baru. Hasil survei juga mengungkapkan bahwa mayoritas wajib pajak hotel dan restoran merasa puas dengan berbagai langkah dalam reformasi perpajakan. Mereka memberikan apresiasi terhadap pendekatan pemerintah yang lebih inklusif, seperti melibatkan berbagai pihak dalam proses sosialisasi, serta menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Kemudahan yang ditawarkan melalui teknologi digital dan penyederhanaan prosedur juga dianggap sebagai terobosan yang mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepuasan ini menjadi indikasi keberhasilan reformasi dalam meningkatkan hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Namun, meskipun banyak kemajuan telah dicapai, masih terdapat ruang untuk perbaikan. Beberapa wajib pajak mengusulkan agar pemerintah lebih sering mengadakan sosialisasi dan pelatihan, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan sistem baru. Wajib pajak dari usaha kecil dan menengah, misalnya, membutuhkan bimbingan tambahan

untuk memahami penggunaan aplikasi pajak secara efektif. Pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan diharapkan dapat membantu kelompok ini agar dapat beradaptasi dengan reformasi perpajakan, sehingga kepercayaan dan kepatuhan mereka terhadap sistem perpajakan semakin meningkat.

Reformasi perpajakan juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali. Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu komponen utama PAD, dan reformasi ini telah memperbaiki kontribusinya secara signifikan. Pemerintah daerah Bali dapat memanfaatkan peningkatan pendapatan ini untuk pembangunan infrastruktur pariwisata yang lebih baik. Sebelumnya, proses perpajakan yang rumit dan kurang transparan dapat menyebabkan banyak pelaku usaha yang menghindari kewajiban pajaknya atau tidak melaporkan secara akurat. Namun, dengan adanya penyederhanaan prosedur dan penerapan sistem yang lebih efisien, kontribusi pajak dari sektor ini meningkat secara signifikan. Kenaikan PAD ini menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi perpajakan di Bali, yang turut mencerminkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Peningkatan PAD yang signifikan memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah Bali untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pariwisata. Dana tambahan yang diperoleh dapat dialokasikan untuk memperbaiki fasilitas publik, mempercantik destinasi wisata, serta meningkatkan kualitas layanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Dengan infrastruktur yang lebih baik, sektor pariwisata Bali dapat berkembang lebih pesat, yang pada gilirannya akan mendatangkan lebih banyak wisatawan dan menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai hasilnya, reformasi perpajakan bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi pendapatan daerah, tetapi juga untuk kemajuan jangka panjang ekonomi Bali.

Secara keseluruhan, reformasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Bali. Dengan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis teknologi, wajib pajak merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban mereka. Keberhasilan ini dapat dijadikan model bagi sektor perpajakan lainnya di Indonesia. Namun, pemerintah perlu terus meningkatkan kapasitas teknologi, aksesibilitas, dan pelatihan agar dampak reformasi ini lebih merata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan di Bali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Penyederhanaan prosedur perpajakan, penerapan teknologi digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta peningkatan transparansi dan pengawasan berbasis teknologi, telah mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, sosialisasi yang masif dan pelatihan yang lebih intensif juga berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan usaha kecil dan menengah. Secara keseluruhan, reformasi perpajakan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembangunan sektor pariwisata di Bali. Selain dampak langsung terhadap kepatuhan pajak, reformasi perpajakan juga menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi keberlanjutan bisnis di sektor hotel dan restoran. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan efisien, pelaku usaha memiliki lebih banyak waktu dan sumber daya untuk fokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan bisnis mereka. Hal ini tidak hanya mengarah pada peningkatan daya saing sektor pariwisata Bali, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal. Sebagai hasilnya, reformasi perpajakan berfungsi sebagai pendorong utama dalam memperkuat sektor pariwisata Bali, yang menjadi salah satu pilar

utama perekonomian daerah, sekaligus menjamin stabilitas dan keberlanjutan sumber pendapatan daerah di masa depan.

REFERENSI

- Ahmad, E., & Christensen, J. (2020). Tax Compliance in Developing Economies: The Role of Technology and Transparency. *International Journal of Taxation and Public Finance*, 25(2), 112-130.
- Ali, R. (2016). Tax Compliance and Enforcement in Developing Countries: Evidence from Bali. *Journal of Public Economics*, 30(2), 102-118.
- Chien, W., & Hsieh, H. (2019). The Role of Technology in Enhancing Taxpayer Compliance in Southeast Asia. *Asian Economic Policy Review*, 14(4), 67-82.
- Dewi, Ni Luh Ayu. 2022. "Implementasi Kebijakan Perpajakan pada Sektor Pariwisata di Bali." *Jurnal Kajian Kebijakan Publik* 8, no. 1: 45–57.
- Dewi, Ni Made Sri. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak pada Sektor Pariwisata." *Jurnal Perpajakan Indonesia* 12, no. 3: 89–95.
- Djokosoetono, A. (2017). Reformasi Perpajakan di Indonesia: Arah dan Tantangannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, R., & Nurhadi, M. (2020). Sosialisasi Pajak untuk Usaha Kecil dan Menengah: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 3(1), 45-58.
- Munir, S., & Sihombing, A. (2018). Efektivitas Reformasi Perpajakan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Bali. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 15(1), 102-115.
- Simanjuntak, H., & Putra, I. (2021). Peran Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak Hotel dan Restoran di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 13(2), 89-105.
- Soekamto, S. (2014). Dasar-Dasar Penelitian Hukum Normatif. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sulaeman, T., & Farid, M. (2018). Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Bali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(3), 245-263.
- Trivedi, V., & Sheffrin, S. (2020). The Impact of Digitalization on Tax Compliance and Revenue Generation. *International Journal of Public Administration*, 43(7), 1205-1221.